



## Perbandingan Kebijakan Perspektif Kesetaraan Gender Indonesia dan Thailand Partisipasi Masyarakat Dalam Kesetaraan Gender Untuk Membuat Perspektif Kebijakan Pemerintahan di Indonesia dan Thailand

Medina Yazidi<sup>1✉</sup>, Rachmat Ramdani<sup>2</sup>, Maulana Rifai<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : [1910631180085@student.unsika.ac.id](mailto:1910631180085@student.unsika.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Keberadaan Masyarakat menjadi unsur penting bagi suatu Negara yang dikuasai oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu, peran dan fungsi serta keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur bagi pemangku kekuasaan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan. Partisipasi Masyarakat akan paham dan kebutuhan masyarakat dibatasi dengan tingkatan kesetaraan gender yang dinilai kurang merata, maksimal di dalam kubu pemerintahan atau diluar pemerintahan. Hal itu menjadi titik perhatian pemerintah untuk menangani persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan sendiri sebagai unsur terpenting dalam suatu Negara. Sehingga pemerintah menilai dan mempertimbangkan bahwa perlunya tindakan yang bersifat essensial sehingga menjadi elektabilitas pemerintah itu sendiri. Menjadikan studi banding Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand mengenai perspektif kebijakan kesetaraan gender tentu berangkat dari problem atau masalah yang terjadi di Negara asing-masing yang didasari dengan partisipasi masyarakat dan keasadaran masyarakat tentang kesetaraan gender yang lebih mendalam tidak hanya berbicara wanita dan pria saja tetapi berkaitan lebih pada hal itu baik segi ekonomi, social, politik dan budaya. Keterbukaan mindset pemerintah baik di Indonesia atau di Thailand tentu menjadi nilai tambah bagi kebijakan kesetaraan gender terutama menempatkan atau memposisikan kebijakan tersebut sesuai dengan paham masyarakat dan partisipasi masyarakat akan kesetaraan gender yang terus menerus mengalami perubahan sehingga keadilan dan kesetaraan juga kesejahteraan dapat dicapai melalui perspektif gender ini. Karena gender sendiri menganut pengertian yaitu konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat social dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Selain itu, gender dapat diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang

merupakan hasil konstruksi social dan budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri, waktu yang berbeda di setiap tempat dan waktu. Oleh karena itu pemerintah baik di Indonesia atau Thailand tidak boleh anti terhadap pemikiran budaya yang berkembang di masyarakat atas persepsi atau pandangan gender dijadikan hak masyarakat menghilang. Karena jika dikaitkan dengan teori Demokrasi bahwasanya Pemerintah itu berada di tangan Rakyat yang artinya Pemerintahan tersebut sebagai wadah dan penampung aspirasi atas partisipasi terutama menyangkut kesetaraan gender baik di Indonesia atau di Thailand.

Kata Kunci : *Indonesia, Thailand, Gender, Kebijakan, Partisipasi, Pemerintahan*

#### Abstract

The existence of the community is an important element for a country that is controlled by policy makers. Therefore, the roles and functions as well as the existence of the community become a benchmark for power holders to make or implement policies. Community participation will understand and the needs of the community are limited by the level of gender equality which is considered less evenly distributed, maximum within the government or outside the government. This has become a point of concern for the government to deal with problems that occur in society and self-government as the most important element in a country. So that the government assesses and considers the need for essential actions so that it becomes the electability of the government itself. Making a comparative study between the Government of Indonesia and the Government of Thailand regarding the perspective of gender equality policies, of course, departs from problems or problems that occur in their respective foreign countries which are based on community participation and public awareness about gender equality which is deeper, not only talking about women and men but related more in terms of economic, social, political and cultural aspects. The open mindset of the government, either in Indonesia or in Thailand, is certainly an added value for gender equality policies, especially placing or positioning these policies in accordance with community understanding and community participation in gender equality which is constantly changing so that justice and equality as well as welfare can be achieved through this gender perspective. . Because gender itself adheres to the notion that is a concept that refers to the different roles and responsibilities of men and women that occur as a result of social and cultural society, and can change. In addition, gender can be interpreted as society's view of the different roles, functions, and responsibilities between women and men which are the result of social and cultural construction and can change according to the times and get support from the community itself, at different times in the world. every place and time. Therefore, the government, whether in Indonesia or Thailand, should not be anti-cultural thinking that develops in the community on the perception or view that gender is made into the community's right to disappear. Because if it is related to the theory of democracy, that government is in the hands of the people, which means that the government is a forum and shelter for aspirations for participation, especially regarding gender equality, either in Indonesia or in Thailand.

Keywords : *Indonesia, Thailand, Gender, Policy, Participation, Governance*

## PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender telah lama menjadi isu nasional yang penanganannya memerlukan kesadaran dari berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Begitupun sebaliknya kesetaraan gender yang berlebihan dikhawatirkan bisa mengancam keutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauhmana persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga. Hal ini dibuktikan melalui pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata oleh anak laki-laki dan perempuan, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan dalam pengambilan keputusan di keluarga. Singkatnya, kesetaraan gender di dalam keluarga dinilai baik oleh masyarakat asalkan tidak berbenturan dengan sifat kodrati manusia dan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Kesetaraan gender (gender equality) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku (Arkaniyati, 2012). Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender sehingga pelaksanaan kesetaraan gender didalam keluarga dirasa masih jauh dari harapan. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengeksplorasi sejauh mana persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga, lalu masyarakat hingga Pemerintah menyadari kekurangan yang terjadi di masyarakat sehingga Lembaga Negara menjadi symbol dan wadah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengandalkan persepsi dan paham masyarakat akan kesetaraan gender baik di dalam negeri dan diluar negeri serupa permasalahan yang daingkut dan faktornya bermula dari diskriminasi terhadap gender baik perempuan dan laki-laki yang di tempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Keterbatasan Pemerintah adalah mengetahui hal tersebut dengan kultur masyarakat yang majemuk baik di Indonesia maupun di Thailand. Oleh karena itu, fungsi dan peran masyarakat saat menawarkan konflik kesetaraan gender membuat pemerintahan kedua Negara tersebut memiliki gaya dan kultur kebijakan yang berbeda ketika menyelesaikan masalah kesetaraan gender dengan kreatif dan outputnya adalah berdampak bagi masyarakat secara signifikan. Tentu yang melatarbelakangi gerakan kesetaraan gender dari kedua Negara ini berbeda. Berangkat dari Thailand yang gerakan kesetaraan gender pengaruh dari kondisi ekonomi social sehingga

menyebabkan sikap diskriminasi terhadap kaum perempuan. Begitu pula dengan Indonesia yang sampai saat ini masih bisa dirasakan kehadiran perempuan di Indonesia menjadi semakin rentan kasusnya dan mengakibatkan kesetaraan gender yang berhak menduduki posisi jabatan menipis pada kaum perempuan. Posisi kedua Negara secara geografis berada di Asia Tenggara dan memiliki pandangan yang berbeda atau perspektif kebijakan yang berbeda dalam menyelesaikan paham kesetaraan gender di masyarakat. Dan lebih menariknya lagi paham masyarakat akan kesetaraan gender baik di Indonesia atau di Thailand juga memiliki cara tersendiri dengan menghadirkan berbagai pergerakan dengan paham yang sama yaitu keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat dan ditunjukkan kepada pemangku kekuasaan atau kebijakan yaitu pemerintahan itu sendiri. Karena itu muncullah berbagai kebijakan yang mendukung paham masyarakat akan kesetaraan gender dan hal ini masih menjadi kajian apakah kebijakan yang dilakukan kedua Negara baik Indonesia atau Thailand berdampak dan memiliki hasil yang di capai yaitu kesetaraan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta di lini pemerintahan itu sendiri. Karena kembali lagi pada pernyataan unsur Negara adalah masyarakat. Dan masyarakat yang sejahtera serta didukung pemangku kebijakan pemerintahan.

#### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post positivesme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9)

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana jalannya program menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam perspektif gender dan korelasi terhadap kebijakanp pemerintahan baik di Indonesia atau di Thailand sebagai nilai atau indicator kesejahteraan masyarakat yang menganut system budaya demokratis walauun memang keduanya memiliki gaya pemerintahan yang berbeda ada yang presidensi dan ada yang parlementer. Teteapi, tidak menutup kemungkinan paham akan kesetaraan gender menjadi problem atau masalah yang kompleks serta turun temurun yang patutu masyarakat dan pemerintah tuntaskan

seiring perubahan zaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Slameto (1995) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Menurut Walgito (2004) persepsi adalah suatu keadaan dimana individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmat (2004) yang mengungkapkan bahwa persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. UNESCO (2002a) menyebutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosio-kultural yang menggarisbawahi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan secara sistematis memiliki kedudukan dibawah laki-laki. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitawati (2012) yang menyebutkan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa gender merupakan kondisi sosial dimana adanya pembedaan peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan Gender memiliki arti suatu keadaan setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) Dalam rangka menyikapi bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dan kesenjangan dalam pencapaian pembangunan dalam masyarakat, diantaranya:

1. masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya;
2. masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
3. masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik, dan bidang ekonomi;
4. masih banyaknya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, diskriminasi terhadap perempuan dan belum peduli anak;

Di sisi lain masih belum dipahaminya konsep dan isu gender, baik di kalangan masyarakat luas maupun pada tataran pengambil keputusan, para penentu kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, antar tingkat pusat, antar tingkat daerah, atau antar tingkat pusat dan daerah baik di Thailand atau di Indonesia sama-sama memiliki pergerakan masyarakat akan paham kesetaraan gender yang berbeda – beda. Ada beberapa hal yang

menurut paham masyarakat kesetaraan gender harus diluruskan dan menjadi permasalahan :

1. Kebebasan Untuk Menentukan Pilihan dan Mengeluarkan Pendapat

Kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat berawal dari adanya budaya diskusi dalam keluarga. Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa hampir semua responden menjawab hal serupa yaitu mereka memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk mengeluarkan pendapat menentukan pilihan baik itu mengenai pilihan dalam mengambil jurusan, sekolah, ataupun dalam menentukan pasangan hidup anak-anaknya. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat sudah mengaplikasikan salah satu ciri dari pendidikan keluarga berbasis gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan dalam keluarga. Pengenalan gender dalam keluarga harus menjadi salah satu prioritas dalam membangun kesetaraan gender di masyarakat diimbangi dengan nilai agama dan sifat kodrati perempuan. Pendidikan keluarga berbasis gender dapat dianggap sebagai salah satu pendidikan yang efektif dan strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, khususnya nilai keadilan dan kesetaraan gender.

2. Kebebasan Dalam Pengambilan Keputusan

Kebebasan dalam pengambilan keputusan mendorong terjalinnya sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Hal ini juga dirasakan banyak manfaatnya oleh hampir semua responden. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa semua responden mengungkapkan bahwa mereka memberikan kebebasan kepada anak dalam mengambil sebuah keputusan anak laki-laki dan perempuan, dan orang tua berperan sebagai pengarah keputusan yang dipilih oleh anak. Berdasarkan pemaparan di atas diperoleh informasi bahwa implementasi kesetaraan gender telah banyak dilakukan oleh masyarakat didalam keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan hak anak yang sama dalam bidang pendidikan baik, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam pengambilan keputusan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Sehingga secara tersirat kesetaraan gender telah diterima oleh masyarakat dan telah diterapkan di dalam keluarga.

### 3. Pemenuhan Hak yang sama dalam Bidang Pendidikan

Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Dari hasil wawancara ditemukan informasi bahwa semua responden menjawab hal serupa yaitu menyekolahkan semua anak mereka tanpa kecuali. Semua anak mereka dukung untuk berpendidikan. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki laki maupun anak perempuan. Keluarga yang berwawasan gender tidak akan menjadikan gender sebagai penghalang ruang gerak pengembangan potensi seorang anak, bahkan keluarga tersebut akan selalu mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Fakta serupa terjadi negara lainnya, misalnya di Hongkong. Pada saat ini para orang tua di Hongkong memiliki kebanggaan tersendiri apabila bisa menyekolahkan anak perempuannya ke luar negeri (Kajanus, 2015). Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang bisa sekolah di luar negeri, akan tetapi saat ini justru anak perempuanpun didukung untuk melanjutkan sekolah hingga keluar negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar (2016) yang mengungkapkan bahwa pengasuhan sejak dini yang berwawasan gender perlu dilakukan oleh orang tua dalam keluarga sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah baik bagi laki-laki maupun perempuan.

#### Perspektif Kebijakan Kesetaraan Gender Pemerintahan Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan affirmative action telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang memuat kebijakan keterlibatan perempuan di ruang politik sebanyak 30%, sehingga perempuan memiliki peran politik dalam membuat kebijakan bagi masyarakat. Di tahun 2004 belum ada sanksi maupun teguran bagi partai politik yang belum memenuhi jumlah kuota perempuan sebanyak 30%. Namun tahun 2009, setiap partai politik yang belum memenuhi syarat kuota 30% harus memberikan pengumuman melalui media agar tidak dicoret dalam bursa peserta pemilu. Masalah ini telah termaktub di dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11. Dalam arti lain, terdapat 1 kandidat perempuan dari 3 (tiga) kandidat yang dicalonkan oleh masingmasing partai politik. Jika dilihat dari pergerakannya kesetaraan gender adalah pemenuhan hak yang harus sama baik terhadap laki-laki dan perempuan yang dimana Indonesia memulai pergerakan tersebut melalui bidang politik, demokrasi dan partisipasi tuntutan terhadap perempuan.

Berikut merupakan hasil kajian data dimulai periode pertama gerakan politik Indonesia yang dinilai perempuan memiliki kesempatan kecil dan berpartisipasi.

| PERIODE   | PEREMPUAN  | LAKI-LAKI   |
|-----------|------------|-------------|
| 1955-1960 | 17 (6,3%)  | 272 (93,7%) |
| 1956-1959 | 25 (5,1%)  | 488 (94,9%) |
| 1971-1977 | 36 (7,8%)  | 460 (92,2%) |
| 1977-1982 | 29 (6,3%)  | 460 (93,7%) |
| 1982-1987 | 39 (8,5%)  | 460 (91,5%) |
| 1987-1992 | 65 (13%)   | 500 (87%)   |
| 1992-1997 | 62 (12,5%) | 500 (87,5%) |

Sumber : [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat /info% -11.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/infosingkat/info%20-11.pdf)

Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan affirmative action telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang memuat kebijakan keterlibatan perempuan di ruang politik sebanyak 30%, sehingga perempuan memiliki peran politik dalam membuat kebijakan bagi masyarakat. Di tahun 2004 belum ada sanksi maupun teguran bagi partai politik yang belum memenuhi jumlah kuota perempuan sebanyak 30%. Namun tahun 2009, setiap partai politik yang belum memenuhi syarat kuota 30% harus memberikan pengumuman melalui media agar tidak dicoret dalam bursa peserta pemilu. Masalah ini telah termaktub di dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11. Dalam arti lain, terdapat 1 kandidat perempuan dari 3 (tiga) kandidat yang dicalonkan oleh masing-masing partai politik.<sup>12</sup> Dengan demikian, partisipasi politik perempuan di Indonesia telah diperkuat melalui 3 (tiga) peraturan yang menguatkan dengan menempatkan kuota perempuan dalam ranah politik. Keterbatasan budaya dan agama seharusnya tidak menjadi kelemahan

bagi perempuan dalam meningkatkan kemampuan membentuk keputusan politik, sehingga bisa merepresentasikan kebutuhan hak-hak perempuan. Perempuan memiliki sisi kepribadian yang menarik dengan gaya dan karakter kepemimpinan berbeda dengan laki-laki. Selain itu, proses pemberdayaan terhadap perempuan secara langsung maupun tidak belum mencapai tingkat maksimal sehingga masih banyak perempuan yang belum bisa merumuskan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan masih sering terabaikan, padahal perempuan masih terlibat dalam aktivitas sosial yang mewujudkan rasa social connectivity awareness yang tinggi. Oleh karena itu, dapat diintegrasikan kepentingan tersebut ke ranah politik.

#### Perspektif Kebijakan Kesetaraan Gender Pemerintahan Thailand

Keterangan tahun tersebut adalah rekapan bagaimana perkembangan periode paham kesetaraan gender yang diakui masyarakat di Thailand dan membuahkan hasil gerakan-gerakan yang demikian. Lagi dari pada itu aktivis dari gerakan sejarah tersebut mulai bermunculan yang dimana indikator kesetaraan gender benar-benar berasal dari paham masyarakat Thailand itu sendiri yang didukung juga oleh negara-negara lain serta aktivis pergerakan tersebut mampu berdiri dengan dibuatnya organisasi-organisasi yang mendukung hal tersebut sehingga membuat pemerintah Thailand memandang perspektif kebijakan akan kesetaraan gender di paham masyarakat perlu dikuatkan. Berikut pergerakan kesetaraan gender dan perspektif kebijakan di Thailand yang membuat organisasi sebagai wadah paham kesetaraan gender itu sendiri :

- Kemitraan Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Keadilan (IWP) adalah organisasi akar rumput feminis yang bertujuan untuk mendukung aktivisme di Thailand di antara kawasan Asia lainnya. Berfokus pada komunitas, spiritualitas, keberlanjutan, dan dukungan gerakan lokal yang progresif. IWP berfungsi sebagai pusat retreat kelompok perdamaian masyarakat, dengan fasilitas yang meliputi ruang mediasi, perpustakaan, dan fasilitas tamu. Menurut situs web IWP, yayasan organisasi itu mencakup tiga prinsip inti: feminisme, aktivisme sosial, dan praktik spiritual.'
- Foundation for Women (FFW) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Bangkok, Thailand. Pendirian asli diwujudkan pada tahun 1984 sebagai Pusat Informasi Wanita memberikan nasihat kepada wanita Thailand bepergian ke luar negeri. Pada tahun 1986 FFW membuka penampungan perempuan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga . FFW berfokus pada penyediaan layanan bagi perempuan Thailand seperti tempat penampungan dan pendidikan hak asasi manusia . Pada tahun 1988 FFW memulai proyek Kamla, yang berpusat pada pendidikan masyarakat Bangkok

tentang prostitusi anak dan perdagangan manusia . Pada tahun 1922 proyek Kamla mencapai kesadaran nasional ketika penelitian FFW dicetak dalam *Rencana Aksi PBB Memerangi Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak* . FFW terus membantu perempuan dan anak-anak dalam pengembangan advokasi dan otonomi di komunitas mereka dengan membantu pelatihan sukarelawan melalui pekerjaan yang bias komunitas dan menghubungkan perempuan dengan otoritas yang tepat untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan perubahan sosial. FFW memberikan bantuan bagi individu yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dan domestik.

## SIMPULAN

Pada perbandingan perspektif kebijakan masyarakat akan paham kesetaraan gender baik pemerintah Indonesia atau pemerintah Thailand sama-sama memiliki persamaan yaitu tentang partisipasi, keikutsertaan, sama rata dalam proses politik, ekonomi dan pembangunan dari abad ke-19 hingga seterusnya. Dengan paham tersebut masyarakat memunculkan berbagai aktivis-aktivis untuk menghadirkan organisasi-organisasi penentangan atas tuntutan keadilan bagi masyarakat. Di Indonesia hal tersebut dilatarbelakangi oleh ideology dasar Negara sebagai pembaharuan semenjak abad ke – 19 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan Thailand, kebijakan yang mutlak penuntutan penuh bersandar pada hak dan putusan pemerintahan Thailand. Thailand merupakan Negara berkembang di Asia Tenggara dan memulai pola pikir Negara maju sehingga banyak didukung dari pemerintah eropa dan amerika untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender di Thailand sendiri. Kedua Negara baik Indonesia dan Thailand menyadari paham kesetaraan gender yang ada di masyarakat menimbulkan perspektif kebijakan yang dibuat dari kedua Negara tersebut. Di Indonesia telah dibuatnya Organisasi KPPA (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai bukti bahwasanya Indonesia memenuhi keinginan akan paham kesetaraan gender pada rakyat dengan dasar ideology sila ke -5 serta didukung oleh kepenuhan kebijaksanaan HAM yang artinya semua manusia tanpa memandang gender baik itu laki-laki atau perempuan memiliki mata yang sama di depan hukum. Tak hanya membuat kebijakan lewat organisasi perlindungan tetapi juga dikuatkan dengan payung hukum dan politik terdapat di Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 yang berisikan bahwa wanita juga dapat berperan dalam partisipasi pencalonan politik itu sendiri. Bersamaan dengan itu di Thailand juga dikuatkan dengan kebijakan dari pemerintah Thailand yang mengakui ada 18 gender di Thailand yang memiliki

arti kebebasan warga Negara pun diatur dan 18 gender perspektif kebijakan pemerintah Thailand telah dibuat guna mencerminkan kebebasandan keadilan bagi Negara Thailand.

Juga kesamaan yang ada di Indonesia dan Thailand Menggunakan Mill's method, ada kesamaan (method of agreement) antara Indonesia dan Thailand, yaitu sebagai negara demokrasi di Asia Tenggara dengan perkembangan budaya politik yang dipengaruhi oleh feodalisme. Disisi lain persamaan tersebut juga menghasilkan perbedaan (method of difference) yang menjadi perbandingan dan analisa bahwa pada perkembangannya persamaan mengalami perubahan seiring pengaruh berkembangnya budaya politik dalam perilaku politik. Ini terlihat bahwa sistem politik Indonesia cenderung stabil dan menghasilkan budaya politik partisipan termasuk dengan adanya ketentuan kuota perempuan di Parlemen sebesar 30 persen. Sedangkan di Thailand budaya politik masih cenderung feodal dengan superioritasnya belum menetapkan jumlah kuota perempuan dalam parlemen. Kuota masih bersifat kesukarelaan partai, dalam hal ini hanya partai Demokrat yang telah membuat kuota 30 persen bagi partainya. Dapat dikatakan ini merupakan bentuk melanggengkan budaya superior atas lakilaki terhadap perempuan meskipun perempuan Thailand telah mengalami peningkatan kualitas. Sedangkan di Indonesia, tantangan budaya dan agama masih menjadi jurang pembeda yang sangat besar bagi keterlibatan perempuan di ranah politik. Selain itu, kepemimpinan perempuan masih belum lumrah untuk penerapan di Indonesia sehingga walaupun serangkaian konstitusi telah mengatur pembagian kuota perempuan di arena politik tetapi implementasi menunjukan masih belum sepenuhnya partai Keterlibatan perempuan yang rendah tidak dapat menghantarkan perempuan dalam menyelesaikan permasalahan isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan, sehingga edukasi dan pembimbingan politik bagi perempuan sangat dibutuhkan agar kaum perempuan berani tampil dalam ranah kepemimpinan yang selama ini dikuasai oleh kaum laki-laki.. Dengan demikian, kualitas demokrasi dalam indikator gender mengalami laju perubahan walaupun masih dalam kategori rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Liza Romanov , The Women of Thailand, Global Majority E - Journal , Vol 3, No. 1 (June 2012), pp.4460, p. 55

Jurnal Sosial Demokrasi edisi 6 tahun 2, Juni Agustus 2009 diakses melalui <http://library.fes.de/pdffiles/bueros/indonesien/07003/jurna%20edisi%206%20 kirim.pdf> akses pada tanggal 11 Februari 2016.

Susiana, Sali, "Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014", Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI/No.10/II/ P3DI/ Mei/2014, hal. 10 dapat diakses melalui [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20SingkatVI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20SingkatVI-10-II-P3DI-April-2014-11.pdf) jam akses 11 Februari 2016

Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol 4 No 2 Desember 2019 p-ISSN 2541-7045

Internet :

UNESCO (2002a). Gender equality in basic education: Education for all. Paris: UNESCO

Puspitawati, H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. PT IPB Press. Bogor.

Prosiding Seminar :

Nurlian & Daulay. (2008). KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN KERJA PADA KELUARGA PETANI LADANG (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2008, Volume II, No. 2